

Kajian Peran Stakeholder terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran

Nabila Amalia *, Ernady Syaodih, Nia Kurniasari

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nabilaamalia728@gmail.com, ernadysyaodih@gmail.com, niawitaesna@gmail.com

Abstract. Sustainable development is a development process that can improve economic levels while maintaining environmental sustainability and social conditions for current and future generations. Problems in regional development can be explained as a gap between the development results that have been achieved at this time and those planned. Pangandaran Regency as one of the New Autonomous Regions is still preparing its government regarding the role of stakeholders and regional development issues such as less than optimal coordination, planning that is less applicable to problems and governance, improving the quality of regional infrastructure, improving the quality of human resources and optimizing PAD management. Therefore, the author identifies the role of stakeholders towards development in Pangandaran Regency. The purpose of this study is to identify the role of stakeholders, strategic goals and improvement efforts that are in accordance with the objectives and priorities of development in Pangandaran Regency. The method used in this research is MACTOR analysis. From the analysis, it was found that the most influential stakeholders in the development of Pangandaran Regency are DPRD, BAPPEDA and DPUTRPRKP Pangandaran Regency. With efforts to increase development efforts based on recommendations based on objectives and priorities in infrastructure services, control of land use change, natural disaster prone management, suppression of growth and occupation rates and coordination between institutions in development in Pangandaran Regency.

Keywords: *Role, Stakeholder, Development, MACTOR.*

Abstrak. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian menjaga kelestarian lingkungan dan keadaan sosial untuk generasi sekarang dan generasi masa depan. Permasalahan dalam pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagai kesenjangan antara hasil pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru yang masih mempersiapkan pemerintahannya terkait peran stakeholder dan permasalahan pembangunan daerah seperti kurang optimalnya koordinasi, perencanaan yang kurang aplikatif dengan permasalahan dan tata kelola pemerintah, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas SDM dan pengoptimalan pengelolaan PAD. Maka dari itu penulis mengidentifikasi peran stakeholder terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi peran stakeholder, tujuan strategis dan upaya peningkatan sesuai dengan tujuan dan skala prioritas Pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis MACTOR. Dari hasil analisis didapatkan bahwa stakeholder yang paling berpengaruh dalam Pembangunan di Kabupaten Pangandaran yaitu DPRD, BAPPEDA dan DPUTRPRKP Kabupaten Pangandaran. Dengan upaya peningkatan upaya pembangunan berdasarkan rekomendasi berdasarkan tujuan dan skala prioritas dalam pelayanan infrastruktur, pengendalian alih fungsi lahan, penanggulangan rawan bencana alam, menekan tingkat pertumbuhan dan pendudukan dan koordinasi antar kelembagaan dalam pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Kata Kunci: *Peran, Stakeholder, Pembangunan, MACTOR.*

A. Pendahuluan

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip bahwa pembangunan generasi saat ini tidak memerlukan kompromi dari generasi berikutnya pada masa yang akan datang dalam berbagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial meliputi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan digunakan saat membuat perencanaan pembangunan dengan konsep pembangunan.

Permasalahan dalam pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagai kesenjangan antara hasil pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta perbedaan antara harapan dan kondisi riil pada saat perencanaan dilakukan. Potensi permasalahan dalam pembangunan daerah umumnya muncul karena belum optimalnya pemanfaatan kekuatan yang ada, kegagalan dalam mengatasi kelemahan yang ada, tidak dimanfaatkannya peluang yang ada, dan ketidaksiapan dalam menghadapi ancaman yang mungkin timbul.

Peran Pemerintah Daerah sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan kekuasaan oleh Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri untuk mencapai pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Kualitas manusia menunjukkan tingkat baik dan buruk, tinggi dan rendahnya sumber daya manusia (SDM). Karena tujuan penciptaan manusia untuk diperankan sebagai khalifah Allah di bumi, maka Allah telah mempersiapkan berbagai potensi sumber daya manusia untuk dikembangkan secara optimal sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu melaksanakan peran kekhalifahan untuk memakmurkan wilayahnya.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Pangandaran yang termuat dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan RPJPD tahun 2016-2026 serta kondisi eksisting di lapangan terdapat banyak persoalan pembangunan seperti masih rendahnya kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan, kebijakan pusat dan provinsi kadang tidak sejalan dengan kebijakan daerah, kurang optimal koordinasi eksternal Bappeda sehingga terkendala dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, belum terbenahnya OPD dengan urusan pembangunan daerah. Hal ini tentu mengindikasikan peran stakeholder yang belum efektif dalam pembangunan daerah terhadap pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Saat ini pembangunan isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pangandaran untuk dokumen kebijakan penataan ruang masih dalam revisi dan kajian ulang yaitu RTRW di Kabupaten Pangandaran. Terdapat juga permasalahan infrastruktur, yaitu ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran hingga saat ini masih relatif terbatas seperti prasarana persampahan TPA yang belum optimal penampungannya, air bersih sistem perpipaan dan saluran drainase masih belum tersebar merata di seluruh wilayah. Kemudian, masih perlunya peningkatan kualitas hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi, sarana prasarana pemerintahan belum memadai, masih perlunya peningkatan promosi dan kegiatan pariwisata.

Selain itu, potensi ekonomi yang besar belum dapat termanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini belum optimalnya kemampuan fiskal daerah dalam peningkatan PAD dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah. Kemudian, belum optimalnya prasarana transportasi wilayah untuk pengembangan pariwisata ke depan Kabupaten Pangandaran membutuhkan aksesibilitas lain, seperti bandara, jalur rel kereta api, jalan tol dan pelabuhan untuk keterhubungan antar pusat kegiatan. Maka dari itu, kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan mutlak perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak memahami dengan baik alasan keberadaannya dan kontribusinya dalam pembangunan sehingga perlu untuk meningkatkan peran stakeholder di Kabupaten Pangandaran.

Kesadaran masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Pangandaran masih rendah ini berkaitan dengan rencana pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam prioritas pembangunan tahun 2023 yang dirumuskan dalam RPJPD dan RPJMD lebih memprioritaskan aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, pelayanan dan pembangunan infrastruktur, penataan kawasan kumuh, pengembangan desa wisata dan lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya persoalan pembangunan di Kabupaten Pangandaran khususnya pada peran stakeholder yang perlu untuk dikaji.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Peran Stakeholder terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Memetakan peran stakeholder terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran;
2. Mengidentifikasi hubungan tujuan strategis terhadap peran stakeholder dalam Pembangunan di Kabupaten Pangandaran;
3. Mengidentifikasi upaya untuk meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis MACTOR dengan pendekatan mix methode dengan model concurrent triangulation strategy. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis MACTOR yang menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menganalisis data. Analisis MACTOR merupakan metode analisis kekuatan relatif aktor dan pemangku kepentingan yang melihat bagaimana mereka mirip dan berbeda dalam berbagai masalah dan tujuan yang digunakan untuk mengidentifikasi peran stakeholder terhadap pembangunan di Kabupaten Pangandaran..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan identifikasi pada analisis MACTOR ini keberadaan *stakeholder* yang terlibat dalam Pembangunan di Kabupaten Pangandaran diidentifikasi berdasarkan hubungan dan tujuan baik antar aktor maupun aktor dengan tujuan strategis. Selain untuk mengidentifikasi aktor yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan dan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik yang muncul karena perbedaan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dan adanya daya saing.

Pemetaan peran stakeholder terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran

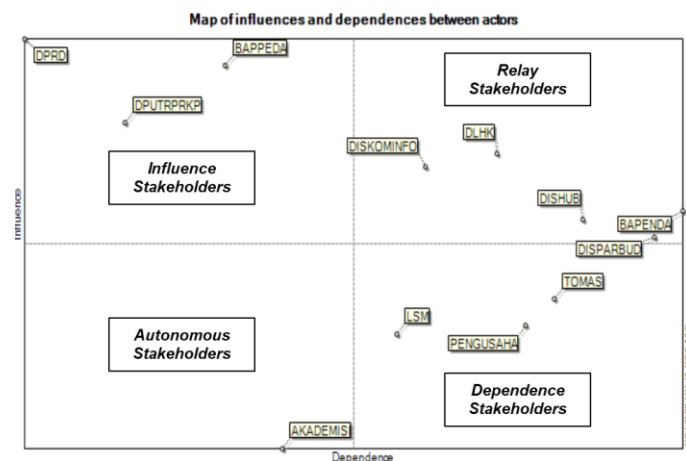
Peran aktor/stakeholder terhadap pembangunan berdasarkan peran dan fokus/kepentingan masing-masing stakeholder untuk mencapai tujuan dapat dilakukan pemetaan peran aktor dari hasil analisis MACTOR dalam kuadran Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (MDII) dan pengaruh dan ketergantungan antara aktor dan tabel Matriks posisi tertimbang (sehubungan dengan daya saing) (3MAO) Tabel 1 dibawah ini..

Tabel 1. Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MAO)

3MAO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4
DPRD	6,0	4,5	3,0	6,0	6,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	-6,0	6,0	-6,0	-6,0
BAPPEDA	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	1,4	4,1	4,1	4,1	4,1	1,4	4,1
DPUTRPRKP	3,8	3,8	3,8	3,8	2,5	3,8	2,5	3,8	3,8	2,5	3,8	3,8	2,5	1,3	-3,8	-2,5
DISHUB	3,8	2,8	2,8	2,8	2,8	1,9	-2,8	2,8	-3,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	-3,8
DLHK	2,2	3,3	3,3	3,3	4,4	-3,3	-2,2	4,4	3,3	-1,1	-2,2	3,3	-3,3	-3,3	3,3	-3,3
DISKOMINFO	4,4	3,3	3,3	2,2	2,2	1,1	1,1	2,2	2,2	1,1	2,2	3,3	1,1	2,2	1,1	-2,2
DISPARBUD	1,8	2,7	-0,9	-0,9	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-3,6	-1,8	-1,8	-3,6	-1,8	-1,8	-3,6	-2,7
BAPENDA	2,8	2,8	-2,8	-3,8	-2,8	-2,8	-1,9	2,8	-3,8	2,8	2,8	-1,9	-2,8	2,8	-1,9	-2,8
LSM	-1,5	-2,3	-1,5	2,3	-1,5	-3,1	-3,1	2,3	1,5	-2,3	1,5	-2,3	2,3	2,3	-2,3	-2,3
PENGUSAHA	-2,2	2,2	-2,2	2,2	1,5	2,2	-3,0	1,5	-2,2	-3,0	2,2	2,2	1,5	3,0	-1,5	1,5
AKADEMISI	1,7	1,7	-1,7	-1,7	-1,1	-1,7	-1,1	-1,7	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	1,1	-1,7	-1,7
TOMAS	-2,4	-1,6	-1,6	-2,4	-0,8	-1,6	-3,2	-2,4	-0,8	-2,4	-1,6	-0,8	-0,8	-1,6	-2,4	-0,8
Number of agreements	30,6	31,3	20,3	26,8	23,5	16,1	13,7	29,9	20,9	16,7	25,5	25,6	14,4	25,7	8,6	5,6
Number of disagreements	-6,2	-3,9	-10,8	-8,8	-9,0	-15,2	-20,0	-6,8	-15,9	-11,7	-6,7	-9,7	-15,8	-6,7	-23,2	-28,1
Degree of mobilisation	36,8	35,2	31,1	35,6	32,5	31,3	33,8	36,8	36,8	28,4	32,3	35,3	30,2	32,3	31,8	33,7

3MAO	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Mobilisation
DPRD	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	171,1
BAPPEDA	1,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	114,6
DPUTRPRKP	-3,8	-3,8	3,8	1,3	3,8	-2,5	3,8	3,8	1,3	-2,5	3,8	1,3	2,5	5,1	95,3
DISHUB	2,8	2,8	-3,8	2,8	-3,8	-3,8	2,8	3,8	-1,9	-3,8	-3,8	-3,8	-1,9	-3,8	92,9
DLHK	-3,3	3,3	3,3	4,4	-2,2	-2,2	-1,1	3,3	-2,2	4,4	-4,4	3,3	3,3	4,4	94,2
DISKOMINFO	1,1	2,2	2,2	2,2	1,1	1,1	-1,1	1,1	1,1	-1,1	1,1	2,2	2,2	-1,1	55,9
DISPARBUD	-2,7	-2,7	-3,6	2,7	-2,7	-2,7	-1,8	-1,8	-1,8	-2,7	-3,6	-1,8	-1,8	-3,6	73,1
BAPENDA	-1,9	-3,8	-1,9	-1,9	-1,9	-2,8	-2,8	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-2,8	-1,9	-2,8	76,2
LSM	-2,3	-3,1	2,3	-2,3	2,3	2,3	1,5	3,1	1,5	2,3	1,5	3,1	3,1	3,1	68,4
PENGUSAHA	-3,0	2,2	2,2	3,0	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	-1,5	1,5	1,5	2,2	64,2
AKADEMISI	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,1	1,1	-1,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,1	-1,7	-1,7	-1,7	45,1
TOMAS	-1,6	-2,4	1,6	1,6	3,2	3,2	2,4	1,6	0,8	0,8	0,8	0,8	-1,6	-0,8	50,8
Number of agreements	11,3	20,7	25,5	28,1	22,8	20,1	22,9	28,3	15,5	19,8	17,3	21,4	22,7	24,9	
Number of disagreements	-20,3	-17,5	-11,0	-5,9	-11,7	-14,0	-7,9	-5,4	-9,5	-13,7	-16,3	-10,9	-8,9	-13,8	
Degree of mobilisation	31,6	38,1	36,5	34,0	34,5	34,1	30,9	33,6	25,0	33,5	33,6	32,3	31,6	38,7	

Sumber: Hasil Analisis MACTOR, 2023.



Gambar 1. Peta Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antar Aktor

Berdasarkan hasil analisis MACTOR pemetaan peran stakeholder terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Gambar 1 Peta Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antar Aktor menunjukkan peran stakeholder secara eksisting dalam Pembangunan sebagai berikut :

1. Kuadran I (Influences Stakeholders)

Aktor/*Stakeholder* yang berada pada kuadran I merupakan penentu sekaligus aktor yang memiliki pengaruh sangat tinggi terhadap aktor yang menempati kuadran II, III dan IV. Selain itu, *stakeholder* yang berada pada kuadran I menjadi aktor yang mandiri sehingga mampu mempengaruhi *stakeholder* lainnya. Aktor-aktor tersebut diantaranya DPRD BAPPEDA dan DPUTRPRKP sehingga ketiga aktor kuat dengan peran maupun kewenangan dan keterlibatannya untuk mengatur *stakeholder* lainnya mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

2. Kuadran II (Relay Stakeholders)

Aktor/*Stakeholder* yang berada pada kuadran II merupakan aktor yang memiliki pengaruh sangat tinggi dan ketergantungan tinggi. Pada kuadran II ini, aktor/*stakeholder* yang memiliki pengaruh dan ketergantungan tinggi dengan *stakeholder* lainnya. *Stakeholder* ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan support system berupa dukungan yang dapat berbentuk arahan rencana, koordinasi pelaksanaan kebijakan, koordinasi program kerja ataupun koordinasi pendanaan dalam Pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Aktor-aktor tersebut diantaranya DLHK, DISKOMINFO, DISHUB, DISPARBUD dan BAPENDA. *Stakeholder* tersebut dinilai bermasalah karena dalam proses tugas pokok dan fungsinya sebatas memenuhi

procedural saja dan bergantung pada ketersediaan anggaran.

3. Kuadran 3 (Dependence Stakeholders)

Aktor/*Stakeholder* yang berada pada kuadran III merupakan aktor yang memiliki pengaruh rendah dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap aktor lain untuk dapat mencapai kepentingan atau tujuan. Pada kuadran III, terdapat 3 aktor diantaranya Pengusaha (Hotel dan Resto), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan TOMAS (Tokoh Masyarakat). *Stakeholder* pada kuadran ini merupakan aktor yang peran, posisi maupun keterlibatannya sangat kecil atau bahkan kurang memiliki pengaruh karena perbedaan tupoksi maupun strategi mencapai tujuan pembangunan.

4. Kuadran 4 (Autonomous Stakeholders)

Aktor/*Stakeholder* yang berada pada kuadran IV merupakan aktor yang memiliki pengaruh sangat rendah dan tingkat ketergantungan yang rendah pula terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Dengan keberadaan dari aktor yang berada di kuadran IV menjadi tidak signifikan terhadap setiap tujuan/isu/program dalam Pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Aktor/*Stakeholder* yang berada pada kuadran IV yaitu AKADEMISI (Dosen Perguruan Tinggi) berdasarkan kondisi dilapangan AKADEMISI (Dosen) yang memiliki peran memberikan masukan melalui proses analisis, kajian dan penelitian secara komprehensif yang dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2. Peringkat Derajat Mobilisasi Aktor Terhadap Tujuan (3MAO)

Aktor	Mobilisasi	Ranking
DPRD	171,1	1
BAPPEDA	114,6	2
DPUTRPRKP	95,3	3
DLHK	94,2	4
DISHUB	92,9	5
BAPENDA	76,2	6
DISPARBUD	73,1	7
LSM	68,4	8
PENGUSAHA	64,2	9
DIKOMINFO	55,9	10
TOMAS	50,8	11
AKADEMISI	45,1	12

Sumber : Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.

Pada urutan *ranking* diatas dapat terlihat bahwa 3 *stakeholder* yang memiliki pengaruh tertinggi terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang meliputi ranking 1 = DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), ranking 2 = BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan ranking 3 = DPUTRPRKP.

Identifikasi hubungan tujuan strategis terhadap peran *stakeholder* dalam Pembangunan di Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil analisis MACTOR menunjukkan *ranking* aktor yang paling memiliki pengaruh. Untuk mengetahui hak tersebut dapat dilihat dari posisi aktor dan tujuan pada kuadran. Sehingga nilai tersebut menunjukkan aktor/ *stakeholder* yang paling berpengaruh hingga yang memiliki pengaruh yang kurang. Untuk mengidentifikasi hubungan tujuan strategis dengan peran *stakeholder* dalam pembangunan dapat dilihat pada Tabel 3 Hasil Pemetaan Hubungan antara tujuan dengan Aktor terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 3. Hasil Pemetaan Hubungan antara tujuan dengan Aktor terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran

Kuadran	Aktor	Tujuan Strategis
I	- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Lembaga Swadaya Masyarakat - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Akademisi - Tokoh Masyarakat - Pengusaha	- B1 = Perlu adanya sosialisasi peran masyarakat pembangunan di Kabupaten Pangandaran - C4 = Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan pemberdayaan tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran - D1 = Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan wilayah di Kabupaten Pangandaran - D3 = Perlu adanya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan teknologi di Kabupaten Pangandaran - D4 = Meningkatkan sosialisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi penunjang pembangunan di Kabupaten Pangandaran - D5 = Perlu adanya evaluasi sistem informasi dan teknologi dari perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran - E1 = Perlu adanya upaya pengoptimalan koordinasi antar kelembagaan dalam pembangunan di Kabupaten Pangandaran - E2 = Perlu adanya upaya pengoptimalan pengimplementasian dan target program dengan kebijakan di Kabupaten Pangandaran - E4 = Meningkatkan pembinaan dan <i>controlling</i> secara berkala terhadap pegawai di Kabupaten Pangandaran
II	- Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Badan Pendapatan Daerah	- A1 = Meningkatkan upaya penanggulangan tingkat rawan bencana alam di Kabupaten Pangandaran - A2 = Meningkatkan upaya penanggulangan alih fungsi lahan di Kabupaten Pangandaran - A6 = Meningkatkan penertiban dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Pangandaran - B2 = Menekan jumlah pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pangandaran - B4 = Meningkatkan nilai sosial budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran - B5 = Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pangandaran - C1 = Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran - C2 = Meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pangandaran - C5 = Meningkatkan upaya manajemen dan pengelolaan permodalan bagi usaha masyarakat di Kabupaten Pangandaran
III	-	- A3 = Meningkatkan upaya mengatasi dampak polusi dan pencemaran udara di Kabupaten Pangandaran - B6 = Perlu adanya upaya pengoptimalan peran masyarakat dalam proses

Kuadran	Aktor	Tujuan Strategis
		perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pangandaran - C3 = Meningkatkan daya saing produktivitas dan kualitas produksi/jasa sektor-sektor riil di Kabupaten Pangandaran - C6 = Perlu adanya upaya pengoptimalan kerjasama promosi antar lembaga dan daerah di Kabupaten Pangandaran - D2 = Meningkatkan kebutuhan dan persediaan perumahan di Kabupaten Pangandaran
IV	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	- A4 = Meningkatkan upaya penertiban kawasan kumuh di Kabupaten Pangandaran - A5 = Perlu adanya upaya pengoptimalan keserasian antar kawasan di Kabupaten Pangandaran - B3 = Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Pangandaran - E3 = Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam proses pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran - E5 = Perlu adanya upaya pengoptimalan proses evaluasi dan pengawasan yang menyebabkan konflik pelaksanaan aturan dan ketidaksiapan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran - E6 = Meningkatkan keberpihakan DPRD terhadap implementasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Pangandaran - E7 = Meningkatkan dukungan alokasi anggaran untuk prioritas pembangunan di Kabupaten Pangandaran

Sumber : Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.

Berdasarkan hasil penilaian aktor pada setiap Lembaga menilai beberapa tujuan strategis menunjukkan hubungan tujuan-aktor dengan fokus dari tiap aktor terhadap tujuan yang didukungnya berdasarkan penilaian aktor yang dihasilkan oleh pemetaan posisi kuadran 3MAO. Sehingga, dianggap sejalan dengan kondisi lapangan pada tujuan strategis Pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Dalam pelaksanaannya isu tersebut disetujui sebagai prioritas atas nilai tertinggi dari penilaian dan pendapat 12 *stakeholder*.

Dimana, hasil *Map of Actor/ Objective Relationship* menunjukkan bahwa pada Kuadran I dengan stakeholder meliputi DPRD, LSM, DISKOMINFO, BAPPEDA, DPUPRPRKP, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha menilai bahwa beberapa tujuan strategis mampu secara mandiri berhubungan dengan peran, kepentingan dan kewenangan dalam mencapainya dan memiliki pengaruh tinggi serta ketergantungan yang rendah. Beberapa tujuan tersebut meliputi D1, E2 dan E1.

Identifikasi upaya untuk meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran

Analisis MACTOR menghasilkan tujuan-tujuan utama atau biasa diartikan dengan tujuan strategis untuk dijadikan program utama sebagai strategi rekomendasi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. *Strategic Recommendation* ini bisa ditunjukkan berdasarkan hasil penilaian tujuan prioritas berdasarkan

Peringkat *Number of Agreements* hasil penilaian ketersetujuan *stakeholder* yang diurutkan berdasarkan ranking dengan justifikasi yang dilihat dari kendala atau permasalahan aktor terhadap program atau kebijakan yang terjadi di lapangan

Tabel 4. Tujuan Prioritas Berdasarkan Ranking *Number of Agreements* Hasil Penilaian Aktor

Kode	Tujuan Strategis	<i>Number of Agreement</i>	<i>Ranking</i>
A2	Meningkatkan upaya penanggulangan alih fungsi lahan di Kabupaten Pangandaran	31,3	1
A1	Meningkatkan upaya penanggulangan tingkat rawan bencana alam di Kabupaten Pangandaran	30,6	2
B2	Menekan jumlah pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pangandaran	29,9	3
E1	Perlu adanya upaya pengoptimalan koordinasi antar kelembagaan dalam pembangunan di Kabupaten Pangandaran	28,3	4
D2	Meningkatkan kebutuhan dan persediaan perumahan di Kabupaten Pangandaran	28,1	5
A4	Meningkatkan upaya penertiban kawasan kumuh di Kabupaten Pangandaran	26,8	6
C2	Meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pangandaran	25,7	7
B6	Perlu adanya upaya pengoptimalan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pangandaran	25,6	8
B5	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pangandaran	25,5	9
D1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan wilayah di Kabupaten Pangandaran	25,5	10

Sumber : Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.

Untuk tujuan prioritas ditunjukkan berdasarkan *Number of Agreement* pada hasil penilaian matrik 3MAO yang merupakan hasil iterasi 3 untuk perencanaan 20 mendatang pada analisis MACTOR dengan nilai persetujuan paling tinggi dari 30 tujuan strategis yang dinilai oleh 12 stakeholder sebagai upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran dengan nilai tertinggi yaitu tujuan “Meningkatkan upaya penanggulangan alih fungsi lahan di Kabupaten Pangandaran”. Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa jumlah lahan yang masuk ke LP2B mencapai 12.785 Ha. Mekanisme penggantian lahan berlaku dalam LP2B jika terjadi alih fungsi lahan. Selain itu, peran antar *stakeholder* dalam mewujudkan upaya pada tujuan prioritas diatas 12 *stakeholder* terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan memberikan masukan, umpan balik, dan saran.

Tabel 5. Skala Prioritas Berdasarkan Ranking *Degree of Mobilisation* Hasil Penilaian Aktor

Kode	Tujuan Strategis	<i>Degree of Mobilisation</i>	<i>Ranking</i>
E7	Meningkatkan dukungan alokasi anggaran untuk prioritas pembangunan di Kabupaten Pangandaran	38,7	1
C6	Perlu adanya upaya pengoptimalan kerjasama promosi antar lembaga dan daerah di Kabupaten Pangandaran	38,1	2

Kode	Tujuan Strategis	Degree of Mobilisation	Ranking
A1	Meningkatkan upaya penanggulangan tingkat rawan bencana alam di Kabupaten Pangandaran	36,8	3
B2	Menekan jumlah pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pangandaran	36,8	4
B3	Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Pangandaran	36,8	5
D1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan wilayah di Kabupaten Pangandaran	36,5	6
A4	Meningkatkan upaya penertiban kawasan kumuh di Kabupaten Pangandaran	35,6	7
B6	Perlu adanya upaya pengoptimalan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pangandaran	35,3	8
A2	Meningkatkan upaya penanggulangan alih fungsi lahan di Kabupaten Pangandaran	35,2	9
D3	Perlu adanya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan teknologi di Kabupaten Pangandaran	34,5	10

Sumber : Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.

Berdasarkan, skala prioritas jangka panjang berfokus pada tujuan dan visi pembangunan daerah dalam jangka waktu yang lebih luas, seperti 10 atau 20 tahun ke depan. Skala prioritas berdasarkan ranking degree of mobilisation. Untuk nilai tertinggi ranking degree of mobilisation yaitu “Meningkatkan dukungan alokasi anggaran untuk prioritas pembangunan di Kabupaten Pangandaran” dengan nilai sebesar 38,7. Berdasarkan hasil analisis Tujuan Prioritas Aktor pada Tabel 4 dapat diambil 10 tujuan prioritas program yang menjadi upaya pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang dapat dikerjasamakan oleh antar stakeholder.

Sedangkan, untuk skala prioritas program berdasarkan Degree of Mobilisation hasil penilaian setiap stakeholder yang tertera pada Tabel 5 skala prioritas berdasarkan ranking degree of mobilisation hasil penilaian aktor yang mana skala prioritas ini akan membantu dalam mengatur waktu, sumber daya, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan prioritas. Penentuan skala prioritas pembangunan setiap prioritas dibuat secara terpisah dan pertimbangan dampak, urgensi, serta kepentingan masing-masing dengan pertimbangan sesuai kondisi dilapangan. Seperti yang tercantum diatas yang menjadi tujuan prioritas pembangunan diprioritaskan dalam setiap skala prioritas yang ditentukan menjadi 5 skala prioritas dipilih berdasarkan prioritas setiap dimensi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan peran stakeholder terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran dihasilkan bahwa aktor/stakeholder yang paling berpengaruh dan memiliki power yang kuat untuk mempengaruhi stakeholder lain yaitu DPRD, BAPPEDA dan DPUTRPRKP untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan stakeholder lain dan mampu mempengaruhi serta memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak. Sedangkan, untuk stakeholder yang memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan rendah yaitu Akademisi yang seharusnya keberadaan dan perannya sangat dibutuhkan terhadap proses pembangunan dalam memberikan masukan, analisis dan evaluasi terkait kebijakan maupun program Pemerintah Daerah.
2. Hubungan tujuan strategis terhadap peran stakeholder dalam Pembangunan di Kabupaten Pangandaran dihasilkan berdasarkan hasil peta hubungan stakeholder dengan

tujuan yang terdiri dari 8 stakeholder pada Kuadran I yaitu DPRD, LSM, DISKOMINFO, BAPPEDA, DPUTRPRKP, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha yang menilai beberapa tujuan strategis memiliki pengaruh yang kuat dan ketergantungan rendah sehingga memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan mendukung tujuan dalam proses pembangunan diantaranya tujuan strategis B1, C4, D1, D3, D4, D5, E1, E2 dan tujuan E4. Sedangkan tujuan yang terdapat di Kuadran III yaitu yang memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan tinggi meliputi tujuan A3, B6, C3, C6 dan tujuan D2.

3. Upaya untuk meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil analisis terdapat 10 tujuan prioritas dan 5 skala prioritas yang dinilai oleh para stakeholder teridentifikasi sebagai berikut : 1) Meningkatkan upaya penanggulangan alih fungsi lahan di Kabupaten Pangandaran, 2) Meningkatkan upaya penanggulangan tingkat rawan bencana alam di Kabupaten Pangandaran, 3) Menekan jumlah pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pangandaran, 4) Perlu adanya upaya pengoptimalan koordinasi antar kelembagaan dalam pembangunan di Kabupaten Pangandaran, 5) Meningkatkan kebutuhan dan persediaan perumahan di Kabupaten Pangandaran dan 5 tujuan prioritas lainnya. Sedangkan, untuk skala prioritas yang teridentifikasi menjadi 5 skala prioritas yang mewakili setiap dimensi.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan mengucapkan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA, Bapak Dr. Ernady Syaodih, Ir., M.T. dan Ibu Dr. Nia Kurniasari, S.T., M.T. sebagai dosen pembimbing, kepada kedua orang tua dan keluarga, kepada teman-teman terdekat dan mahasiswa Planologi UNISBA Angkatan 2019 atas arahan, bimbingan, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Fauzy, A., 2019. Teknis Analisis Berkelanjutan. PT Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Syaodih, Ernady., 2015. Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota. Bandung. PT Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, 2017. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- [4] Pambudi, H. D. A., & Kurniasari., 2021. Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota* .Bandung
- [5] Fitri Nurfitriani, D. D. R., 2015. Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau (Stakeholder Analysis In Green Fiscal Policy Transformation). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol 12(2), 106–107.
- [6] Ridho, M. F., & Kurniasari, N. (2023). Kajian Peran Stakeholder dalam Pembangunan Kota Berbasis Smart Living di Pagedangan Tangerang. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 9–16. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1816>
- [7] Syawal, M. R., & Hendrakusumah, E. (2023). Revitalisasi Desa Adat Budaya Hibua Lamo di Desa Kakara Lamo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 17–28. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1927>